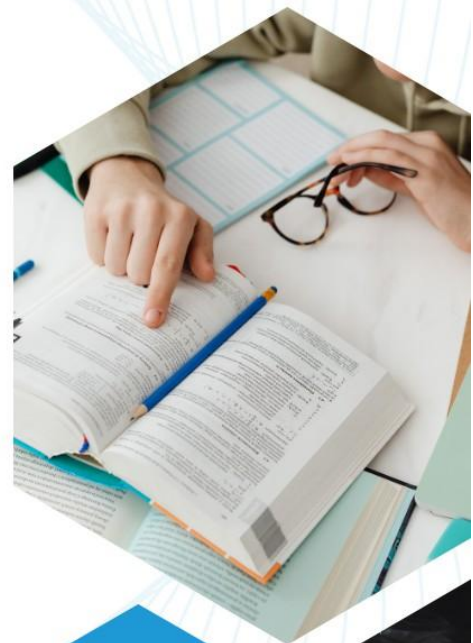




Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Badan Layanan Umum
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

LAPORAN KINERJA

Triwulan 1
Tahun 2025



Jl. Martoloyo PO BOX 22 Tegal, Kode Pos 52122



(0282) 356393



<https://kkp.go.id/unit-kerja/bppsdmkp/upt/bppp-tegal.html>

<https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-tegal/>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat Serta Karunia-Nya, Badan layanan Umum (BLU) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj BLU BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran Triwulan I Tahun 2025 yang terkait dengan evaluasi pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan disisi lain laporan kinerja merupakan alat kendali, pemacu dan umpan balik peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.

Mengingat bahwa Laporan Kinerja merupakan indikator keberhasilan dari suatu penyelenggaraan organisasi pemerintahan, kami berusaha dengan sebaik mungkin untuk dapat menyajikan laporan ini agar dapat digunakan dalam menyusun kebijakan di BPPP Tegal.

Tegal, 17 April 2025

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



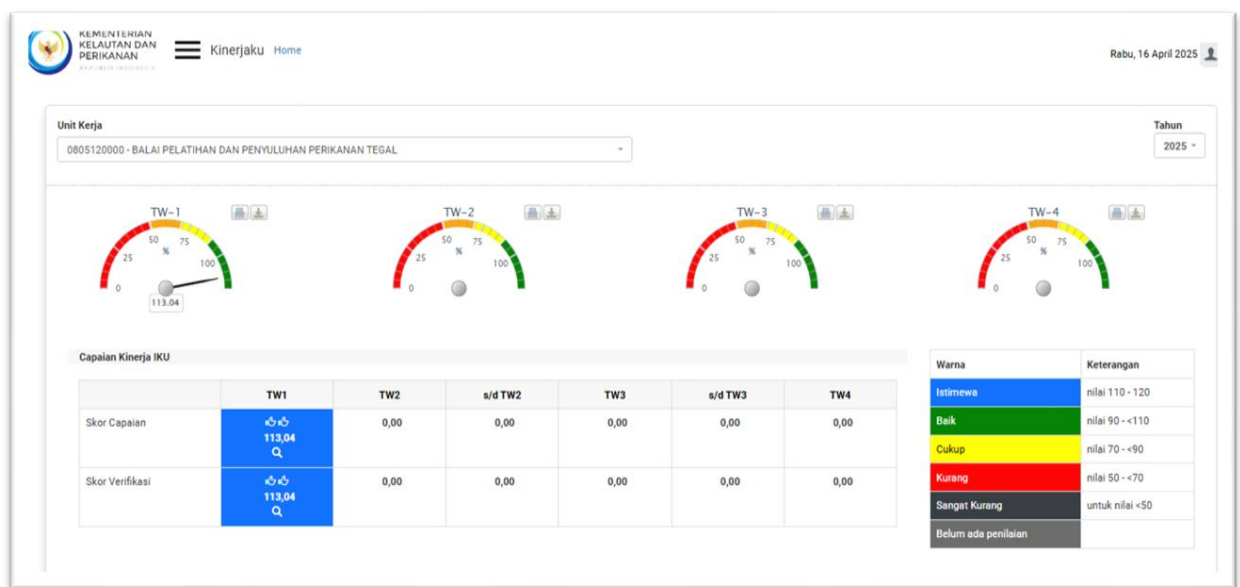
ACHMAD SUBIJAKTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Tegal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja BPPP Tegal pada Tahun 2025 selaras dengan kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sehingga BPPP Tegal selaku UPT yang berada di bawahnya turut berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPSDMKP. BPPP Tegal memiliki tanggung jawab untuk mendukung 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja, secara umum kinerja BPPP Tegal pada Triwulan I Tahun 2025 masuk dalam kategori baik. Perolehan Nilai Kinerja Organisasi yaitu 113,04%.



Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal yang terukur pada Triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 7 (tujuh) indikator yang telah tercapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	
						Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	8.817	-	-	-
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	3.762	5.273	120 (140,16)
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81	4,06	6,770	120 (166,70)
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	530	500	668	120 (133,51)
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	-	-	-
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	-	-	-
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	25,00	35,00	120 (140)
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83	-	-	-
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	85	100	117,65%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80	-	-	-
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	
						Capaian	%
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	80	100	120 (125)
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,5	-	-	-
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	50	50	50	100%

Pagu Anggaran yang dialokasikan kepada BPPP Tegal Tahun 2025 adalah sebesar Rp 37.153.704.000,- telah terrealisasi sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp 4.383.166.449- atau 11,80 %. Secara umum kinerja BPPP Tegal cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi triwulan I tahun 2025 capaian kinerja dengan target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggungjawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Dalam pengumpulan data dukung masih ada ditemukannya duplikasi data dan data yang kurang lengkap yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka perlu dilakukan verifikasi data secara teratur dan teliti sehingga capaian kinerja sesuai dengan data dukung yang ada.

Laporan Kinerja ini berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* Balai. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Balai. BPPP Tegal berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi BPPP Tegal	3
1.4. Struktur Organisasi	4
1.5. Keragaan SDM BPPP Tegal.....	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
1.7. Potensi dan Permasalahan	9
1.7.1 Potensi.....	9
1.7.2 Permasalahan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis.....	12
2.1.1. Visi	13
2.1.2. Misi	14
2.1.3. Tujuan	15
2.1.4. Sasaran Kegiatan.....	15
2.2. Strategi Pelaksanaan Program BPPP Tegal	17
2.3. Rencana Kerja Tahun 2025.....	18

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	19
2.5. Pengukuran Kinerja	22
2.5.1. Rumus Pengukuran.....	22
2.5.2. Metode Pengukuran Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.....	24
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	25
3.2. Akuntabilitas Keuangan	61
3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Sumber Daya.....	63
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Capaian Kinerja Utama	64
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	66
4.3. Permasalahan dan Rekomendasi.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPPP Tegal	5
Gambar 2 Komposisi Pegawai BPPP Tegal.....	6
Gambar 3 Komposisi Pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.....	6
Gambar 4 Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan.....	7
Gambar 5 Nilai Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 pada dashboard aplikasi kinerjaku	24
Gambar 6 Grafik Purnawidya Pelatihan Masyarakat berdasarkan Jenis Pelatihan, Kompetensi, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	29
Gambar 7 Perbandingan Capaian IKU 2 dengan tahun sebelumnya.....	30
Gambar 8 Perbandingan Capaian PNBPP dengan tahun Sebelumnya	34
Gambar 9 Perbandingan Capaian SDM KP yang bersertifikasi kompetensi.....	36
Gambar 10 Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh dengan tahun sebelumnya.....	59
Gambar 11 Realisasi per output anggaran BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025.....	61
Gambar 12 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025	iv
Tabel 2 Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025	18
Tabel 3 Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025	21
Tabel 4 Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Penyuluhan Tahun 2025	22
Tabel 5 Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel 6 Capaian IKU 2 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih BPPP Tegal.....	29
Tabel 7 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I IKU 2 Masyarakat KP dilatih dengan unit kerja sejenis.....	31
Tabel 8 Capaian IKU 3 Nilai PNBP Satker BPPP Tegal.....	33
Tabel 9 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I IKU 3 Nilai PNBP dengan unit kerja sejenis	34
Tabel 10 Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang) .	36
Tabel 11 Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 7 SDM KP yang bersertifikat kompetensi dengan unit kerja sejenis.....	37
Tabel 12 Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025	41
Tabel 13 Capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%).....	42
Tabel 14 Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025	42
Tabel 15 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I Tahun 2025 IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%).....	45
Tabel 16 Kategori Nilai Indeks Profesionalitas ASN.....	48
Tabel 17 Capaian IKU 9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	49
Tabel 18 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I IKU 9 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan unit kerja sejenis.....	50

Tabel 19 Capaian IKU 12 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%).....	53
Tabel 20 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis	54
Tabel 21 Capaian IKU 14 Kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	58
Tabel 22 Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 10 Kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh dengan unit kerja sejenis	59
Tabel 23 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	61
Tabel 24 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama	62
Tabel 25 Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025	65
Tabel 26 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun2024	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025	1
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Penyuluhan Tahun 2025 4	
Lampiran 3 SK Tim Pengelola Kinerja Tahun 2025	6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program presiden terpilih dan arah pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dan peta jalan Ekonomi Biru maka kerangka pikir pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan mindset pembangunan sektor kelautan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang mempertimbangkan daya dukung dan berorientasi pasar dengan menempatkan ekologi sebagai panglima untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal serta mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya KP. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal turut berkontribusi pada kebijakan pokok tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian pada Triwulan I Tahun 2025;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Tegal;
3. Sebagai umpan balik (*Feedback*) untuk perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Tegal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi BPPP Tegal

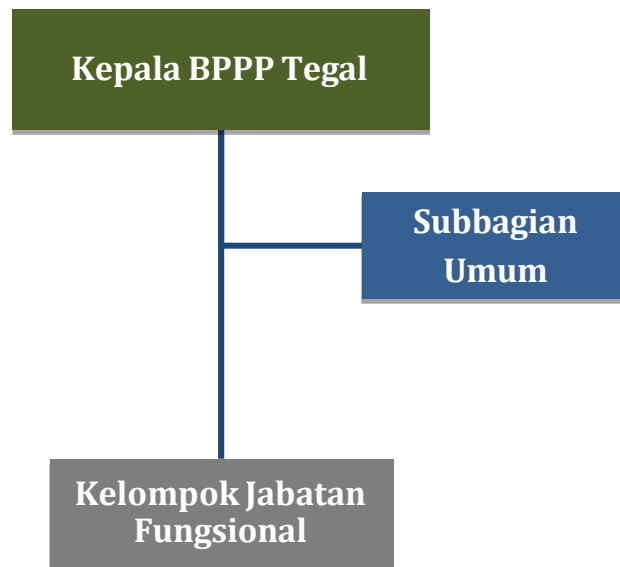
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BPPP Tegal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan;
- b. penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Struktur Organisasi di BPPP Tegal dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPPP Tegal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala BPPP Tegal dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

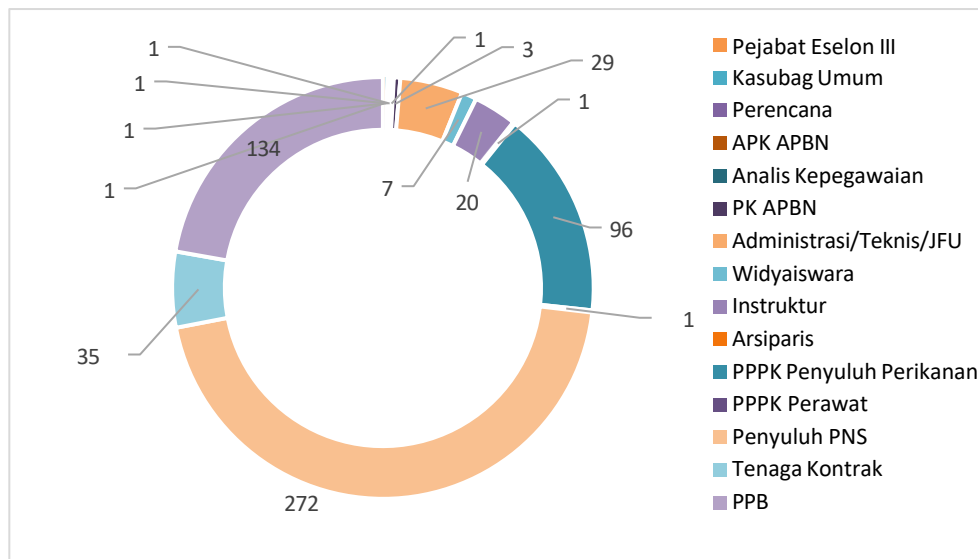
B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.

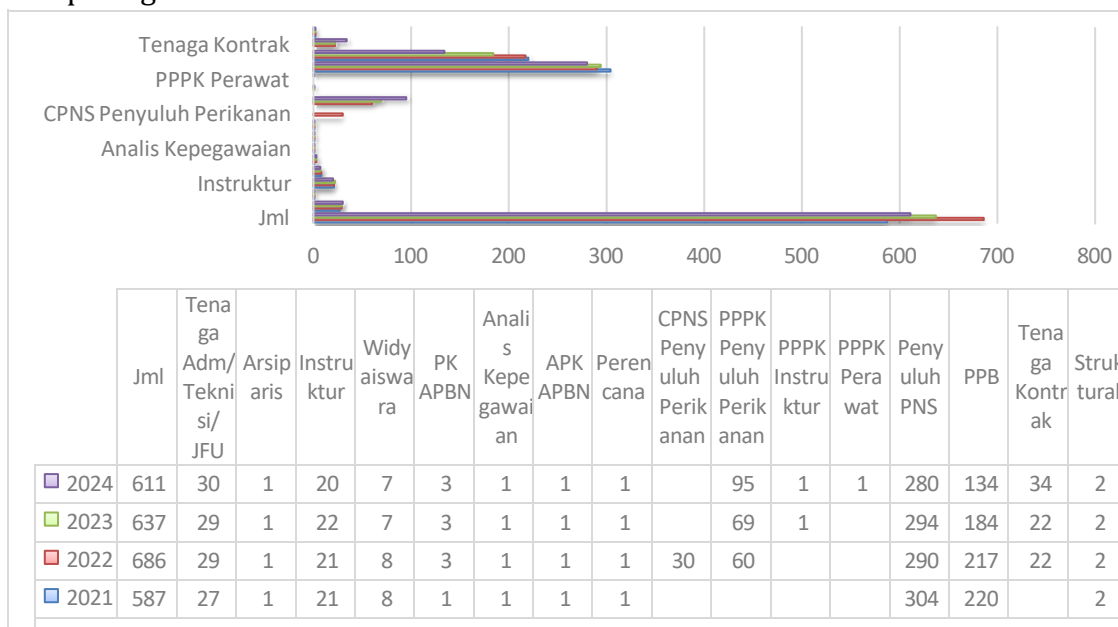
1.5. Keragaan SDM BPPP Tegal

Jumlah pegawai negeri sipil di BPPP Tegal per 1 Maret 2025 sebanyak 603 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut:



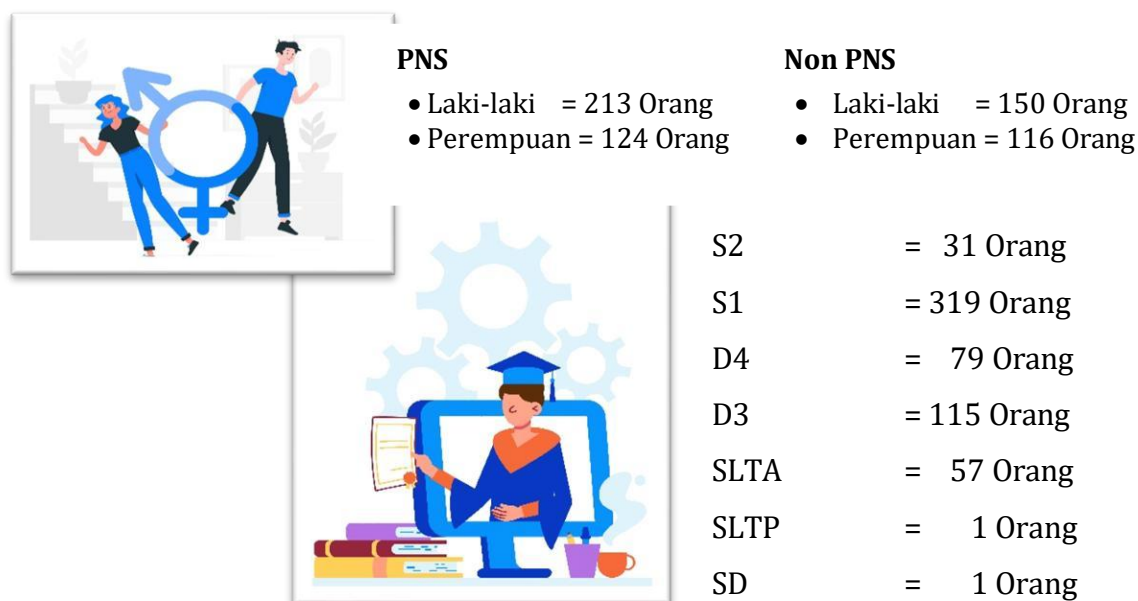
Gambar 2 Komposisi Pegawai BPPP Tegal

Komposisi pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3 Komposisi Pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 4 Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LKj BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar, merupakan pembuka awal laporan yang berisi pandangan umum tentang isi laporan dan pengesahan laporan;

Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama tahun tersebut;

Bab I – Pendahuluan,

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Bab III –Akuntabilitas Kinerja,

Capaian Kinerja Organisasi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Realisasi Anggaran:

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup,

Kesimpulan umum atas capaian Kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran,

Perjanjian Kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

1.7. Potensi dan Permasalahan

1.7.1 Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 7 (tujuh) propinsi di No. Wilayah kerja BPPP Tegal yaitu propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

BPPP Tegal juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 4 (empat) provinsi meliputi provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. BPPP Tegal bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Tegal dalam mencapai tujuan organisasi:

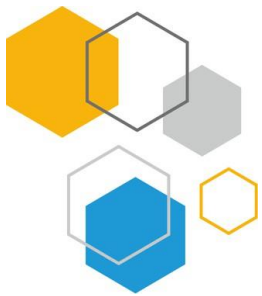
1. Memiliki SDM yang ahli, profesional dan berpengalaman dibidangnya serta bersertifikasi yang berkomitmen kuat untuk berkembang dan memajukan diklat;
2. Memiliki sarpras diklat yang memadai dan representatif;
3. Penyelenggaraan *Basic Safety Training* (BST), *Basic Safety Training* Kapal Layar Motor (BST KLM), *Basic Safety Training - Fisheries I* (BSTF I), *Basic Safety Training - Fisheries II* (BSTF II) dan Rating Internasional;

4. Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 bidang Kelautan dan Perikanan yang telah di lisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK LSP Kelautan dan Perikanan;
5. Sebagai tempat kedudukan PUKAKP Wilayah V;
6. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015);
7. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran staf untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan mutu diklat;
8. Letak yang strategis berada pada jalur pantura Jawa, ditengah Kota Tegal dan berada pada lingkungan perikanan yang produktif;
9. Forum komunikasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta (bidang perikanan);
10. Kebutuhan tenaga kerja yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengikuti diklat;
11. Peningkatan kerjasama dengan instansi sejenis dan asosiasi industri/profesi;
12. Kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kediklatan di dalam dan luar negeri;
13. Optimalisi pemanfaatan fasilitas BPPP Tegal yang tersedia;
14. Indonesia telah meratifikasi STCW-F pada tahun 2019;
15. Permen KP No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
16. Beberapa diklat kepelautan masih dalam proses approval;
17. BPPP Tegal mampu menghasilkan produk perikanan yang layak dipasarkan.
18. BPPP Tegal mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas garam rakyat.
19. BPPP Tegal memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar.
20. BPPP Tegal mampu melakukan pelatihan daring yang memungkinkan peserta melakukan praktek dan dipandu langsung oleh pelatih.

1.7.2 Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Tegal memiliki beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum terbitnya penetapan dan pengaturan SOTK yang mengatur unit kerja level UPT setelah perubahan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP, menyebabkan masih melekatnya fungsi penyuluhan pada BPPP Tegal sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi pelatihan;
2. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas sedangkan permintaan pelatihan terus bertambah;
3. Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
4. Kurikulum dan modul pembelajaran belum seluruhnya tersedia dan terstandar;
5. Kompetensi dan jumlah SDM BPPP Tegal perlu ditambah dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pelatihan seiring telah berubahnya menjadi Badan Layanan Umum;
6. Kurangnya penerapan regulasi terhadap persyaratan kompetensi pekerja/calon pekerja di bidang kelautan dan perikanan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1. Rencana Strategis

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

1.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Visi BPPP Tegal pada tahun 2025-2029 adalah menggunakan Visi BPPSDM, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

1.1.2 Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Tegal menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

1.1.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan;
- 2) Meningkatnya pelayanan pendidikan;
- 3) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas tenaga kerja;
- 4) Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
- 5) Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BPPSDM guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”.

Berdasarkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2025 Tanggal 23 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka terdapat perubahan sasaran kegiatan program pelatihan dan penyuluhan KP yang dilaksanakan oleh BPPP Tegal adalah sebagai berikut :

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK.1 Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan.

Pelatihan SDM KP diselenggarakan guna menjembatani kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama/pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) dengan target indikator kinerja ini pada Tahun 2025 sebesar 8.817 orang;

- b) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang) ditargetkan sebanyak 12.540 orang pada Tahun 2025;
- c) Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar) dengan target Tahun 2025 sebesar Rp.7.810.000.000,-;
- d) Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 530 orang.

SK.2 Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM KP. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit) Tahun 2025 target indikator kinerja ini sebanyak 1 unit;
- b) Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit) Tahun 2025 target indikator kinerja ini sebanyak 1 unit.

SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

- a) Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%), ditargetkan sebesar 100%;
- b) Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks), ditargetkan indeks sebesar 83;
- c) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%), dengan target 85%;
- d) Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai), dengan target Nilai 80;
- e) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%), dengan target 80%;

f) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%), dengan target 80%;

g) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai), dengan target Nilai 71,5

SK.4 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Penyuluhan KP dilaksanakan guna memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

a) Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok) Tahun 2025 target indikator kinerja ini sebanyak 50 kelompok.

1.2. Strategi Pelaksanaan Program BPPP Tegal

Strategi pencapaian sasaran kegiatan pelatihan dan penyuluhan BPPP Tegal adalah sebagai berikut:

a) Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mensinergikan unit-unit kerja di BPPP Tegal sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dapat terlaksana dengan baik. Penempatan SDM yang tepat pada unit-unit kerja juga dapat berkontribusi dalam menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholder.

b) Ketenagaan

Tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam terlaksananya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang baik. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting untuk dilaksanakan. Peningkatan kualitas ketenagaan BPPP Tegal dapat dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya.

c) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan KP

Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Melalui monitoring dan evaluasi, kualitas penyelenggaraan kegiatan dapat dipantau dan diperbaiki jika terdapat kekurangan atau kasalahan dalam pelaksanaannya.

d) Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selain memenuhi kebutuhan stakeholder, kerjasama juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menambah daya jangkau kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang terbatas oleh wilayah kerja dan anggaran.

e) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPP Tegal masih belum sesuai standar penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana mutlak diperlukan guna menghasilkan purnawidya yang berkualitas.

1.3. Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Kegiatan, BPPP Tegal didukung dengan anggaran sebesar Rp 37.153.704.000,- yang dituangkan dalam Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Anggaran (Rp. 000)
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	8.817	
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	16.036.071
		3	Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81	
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	530	318.000
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	600.000

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Anggaran (Rp. 000)
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	4.472.121
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	15.628.712
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83	15.000
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80	
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,5	35.000
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	50	48.800

1.4. Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN & RB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
- 2) Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada *Logical Framework Analysis* (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Triwulan I Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada 27 Januari 2025. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025.

Adapun indikator-indikator pada Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	8.817
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	530
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (Indeks)	83
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,50

Tabel 4 Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Penyuluhan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	50

1.5. Pengukuran Kinerja

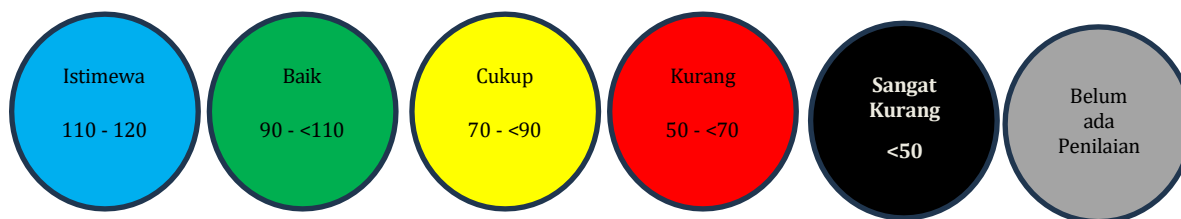
Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Capaian tersebut kemudian dilakukan penginputan data melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan menggunakan *Logical Framework Analysis (LFA)* adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek

1.5.1 Rumus Pengukuran

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

4) Adapun status indeks capaian IKU seperti tabel sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

1.5.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Tegal dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Tegal Nomor: B.8/SK/BPPP.TGL/KP.110/I/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua kelompok di BPPP Tegal. Berdasarkan laporan sub koordinator penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan

BAB III

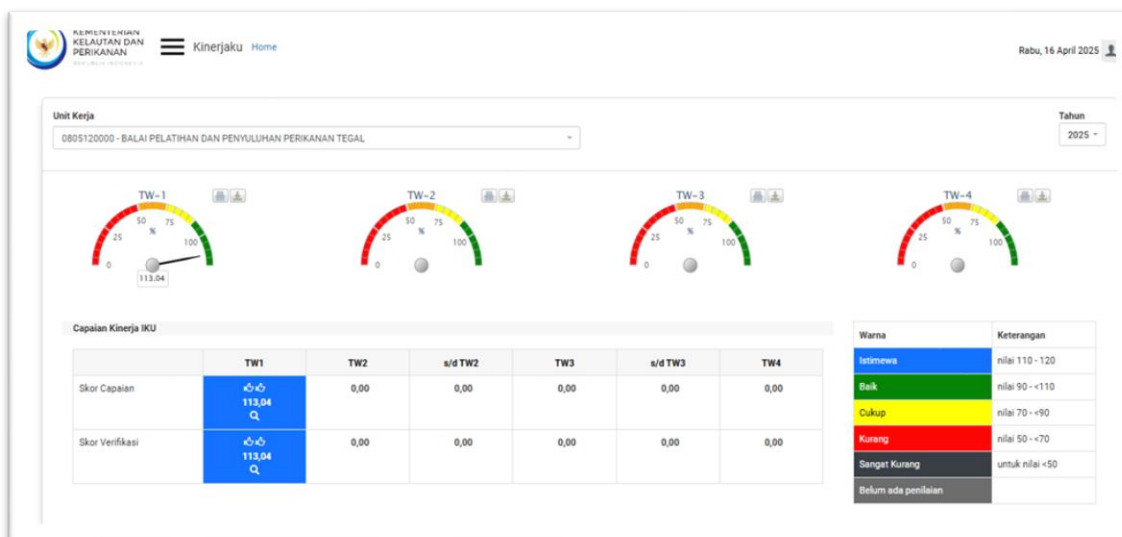
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja Indikator Utama sebesar 113.04 %, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 5 Nilai Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 pada dashboard aplikasi kinerjaku

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Tegal yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2025 BPPP Tegal memiliki kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	
						Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	8.817	-	-	-
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	3.762	5.273	120 (140,16)
		3	Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81	4,06	6,770	120 (166,70)
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	530	500	668	120 (133,51)
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	1	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	
						Capaian	%
	Kelautan dan Perikanan		Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)				
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	-	-	-
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	25,00	35,00	120 (140)
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83	-	-	-
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	85	100	117,65%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80	-	-	-
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	-	-	-
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	80	100	120 (125)
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,5	-	-	-
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	50	50	50	100%

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

BPPP Tegal berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi KKP, selaras dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam menjalankan misi Presiden dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Sesuai Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset kelautan dan perikanan.

Salah satu penjabaran misi tersebut adalah dengan menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, BPPP Tegal didukung oleh indikator kinerja utama antara lain (1) Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja dan (2) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang).

Indikator Kinerja Utama 1

Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan melalui pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat/pelatihan agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Dunia usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB); Dunia industri adalah ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir; Dunia kerja adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi.

IKU 1 Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah Lulusan Pelatihan KP yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah Purnawidya yang telah menyelesaikan pelatihan di Balai Pelatihan KP yang memiliki keterampilan teknis dan non-teknis sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja

Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) diukur dengan menghitung Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya. Indikator ini belum dapat diukur pencapaiannya karena pengukuran dilakukan secara semesteran. Namun hingga akhir triwulan I telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 217 pelatihan dengan jumlah purnawidya sebanyak 5.273 orang. Saat ini untuk capaian Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) dilakukan pendataan untuk purnawidya pelaku usaha/pelaku utama atau yang telah bekerja di bidang kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja Utama 2

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

IKU 2 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN). Peserta

pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pelatihan.

Indikator ini diukur dengan akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan.

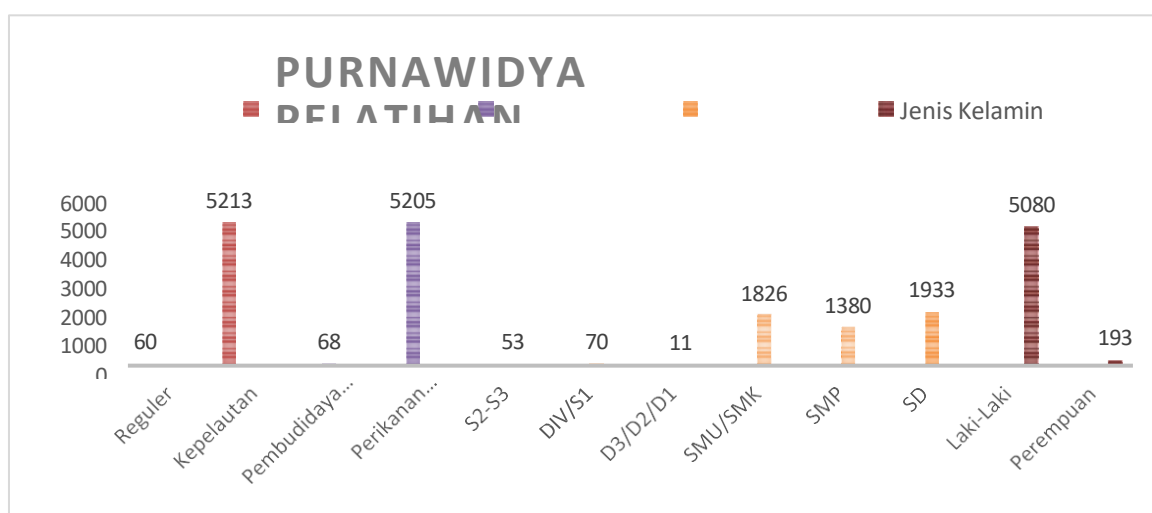
Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Capaian IKU 2 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih BPPP Tegal

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan										
IKU 2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)										
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
1.025	1.233	2.294	8.015	12.540	3.762	5.273	120 (140,16)	-34,21	21.160	24,92

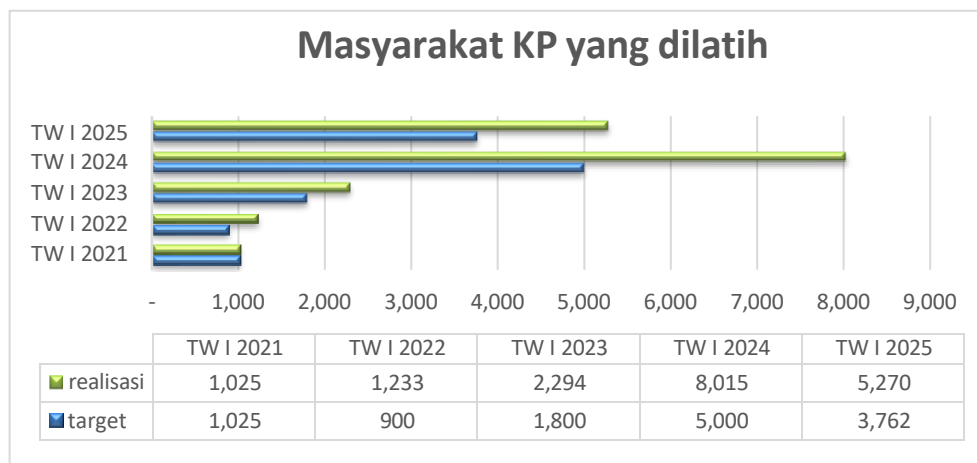
Dari tabel diatas dapat dilihat target tahunan indikator ini sebanyak 12.540 Orang sedangkan target Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 3.762 Orang dan telah terealisasi capaiannya sebanyak 5.273 orang atau tercapai sebesar 120 (140,16)%.

Purnawidya pelatihan masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan jenis pelatihan, kompetensi, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6 Grafik Purnawidya Pelatihan Masyarakat berdasarkan Jenis Pelatihan, Kompetensi, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan sebesar 34,21% hal ini dikarenakan pada triwulan I Tahun 2025 tidak ada kegiatan aspirasi yang dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran. Perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7 Perbandingan Capaian IKU 2 dengan tahun sebelumnya

Dari data diatas dapat dilihat pencapaian target pelatihan mulai dari Triwulan I Tahun 2021 ke Triwulan I 2024 mengalami peningkatan karena potensi BPPP Tegal dan permintaan dari stakeholder dalam penyelenggaraan pelatihan, selain hal tersebut pada awal 2022 BPPP Tegal telah menjadi unit kerja dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum sehingga harus terus untuk memenuhi target PNBP yang semakin meningkat. Namun pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada triwulan I Tahun 2025 tidak ada kegiatan aspirasi yang dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran.

Jika dibandingkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan target Renstra BPPP Tegal 2025-2029 untuk indikator ini telah tercapai sebesar 33,22% dari target sebesar 12.540 orang pada tahun 2025. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 7 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I IKU 2 Masyarakat KP dilatih dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	3.762	5.273	120 (140,16)
2	BPPP Medan	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	-	-	-
4	BPPP Bitung	-	-	-
5	BPPP Ambon	10	48	120 (480)

Adapun Faktor Penyebab keberhasilan untuk kegiatan ini antara lain:

- Adanya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP.
- Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara daring/online sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat.
- Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun, jika terdapat pergeseran, segera dilakukan koordinasi untuk penyesuaian jadwal pelatihan kembali sehingga pelaksanaan sesuai target yang telah ditetapkan.
- Tersedianya database penyelenggaraan dan purnawidya pelatihan dengan baik.

Efisiensi penggunaan sumberdaya bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat dilakukan oleh widyaiswara/instruktur serta dibantu oleh penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu BPPP Tegal, selain itu efisiensi sumberdaya dalam anggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara *blended* sehingga meminimalisir penganggaran kegiatan.

Adapun kegiatan Penunjang antara lain:

- Peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) sehingga dapat mengemas kegiatan pelatihan lebih menarik.
- Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan.
- Adanya kerjasama dengan perusahaan / LPK dalam pelaksanaan pelatihan.

Indikator Kinerja Utama 3

Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya dengan dasar hukum sebagai berikut:

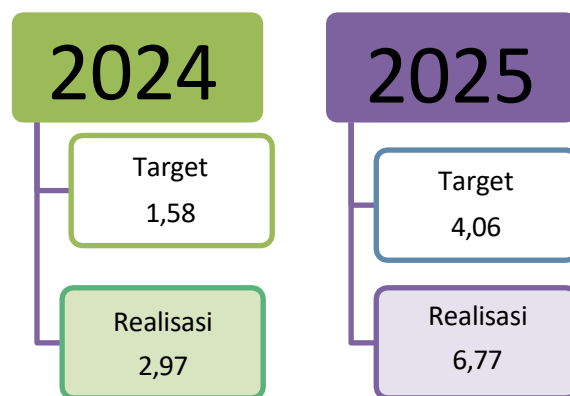
- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor B.2669/SK/BPPP.TGI/KU.320/IV/2025 Tanggal 19 April 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal nomor B. 4549/SK/BRSMBPPP.TGK/KU.320/XI/2022 Tentang penetapan Tarif Layanan BLU BPPP Tegal.

IKU 3 Nilai PNBP Satker BPPP Tegal Tahun 2025 dengan target tahunan yang ditetapkan adalah Rp. 7.810.000.000. Adapun capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Capaian IKU 3 Nilai PNBP Satker BPPP Tegal

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan										
IKU 3. Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)										
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0,52	0,98	2,97	7,81	4,06	6,77	120 (166,75)	127,95	27,1	24,98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IKU Nilai PNBP baru muncul di tahun 2022 setelah BPPP Tegal ditetapkan sebagai satker BLU (Badan Layanan Umum) dan realisasi PNBP terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 realisasi nilai PNBP satker BPPP Tegal mencapai 4,45 rupiah miliar, kemudian tahun 2023 meningkat realisasinya menjadi 9,17 rupiah miliar. Target tahun 2025 indikator nilai PNBP Satker BPPP Tegal sebesar Rp. 7.810.000.000,-, sedangkan target Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 4.060.000.000,- telah terrealisasi Rp. 6.994.826.940,- atau sebesar 120 (166,75)% jumlah tersebut termasuk bunga bank dalam rekening penerimaan PNBP. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan sebesar 127,95% seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8 Perbandingan Capaian PNPB dengan tahun Sebelumnya

Dari gambar diatas dapat dilihat indikator ini mengalami peningkatan target yang signifikan di Triwulan I Tahun 2025, hal tersebut didasari oleh telah ditetapkan BPPP Tegal sebagai unit kerja Badan Layanan Umum, dimana target tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai pembina unit BLU yang semakin meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya layanan pelatihan pada BPPP Tegal. Indikator ini belum terdapat pada target Renstra BPPP Tegal 2020-2024, sehingga indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target renstra. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 9 Perbandingan (*benchmarking*) Capaian Triwulan I IKU 3 Nilai PNPB dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	4,06	6,77	120 (166,75)
2	BPPP Medan	0,01	0,03	120 (300)
3	BPPP Banyuwangi	0,08	0,1	120 (125)
4	BPPP Bitung	0,05	0,06	120
5	BPPP Ambon	0,3	0,42	120 (140)

Faktor penunjang keberhasilan indikator antara lain :

- a. Adanya komitmen dalam pemenuhan target PNBPN yang telah disepakati bersama.
- b. Penetapan BPPP Tegal sebagai satker dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam meningkatkan PNBPN.
- c. Peningkatan pelayanan pelatihan melalui pengembangan aplikasi digital
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja :
 - a. Melakukan promosi penyelenggaraan pelatihan ke perusahaan dan sekolah
 - b. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak luar untuk menghasilkan PNBPN.
 - c. Melakukan monitoring PNBPN melalui sistem informasi yang terintegrasi
 - d. meningkatkan optimalisasi aset serta melakukan peremajaan fasilitas yang lebih modern untuk menghasilkan PNBPN.

Indikator Kinerja Utama 4

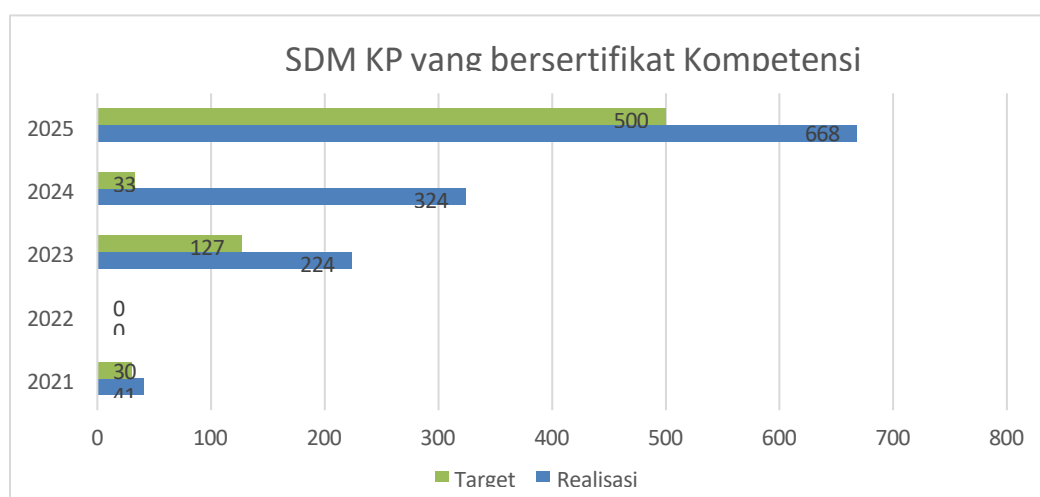
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)

IKU 4 Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Pengukuran indikator ini adalah dengan menghitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Tegal. Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan										
IKU 4. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)										
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
41	0	224	324	530	500	668	120 (133,60)	106,17	-	-

Target Tahunan indikator Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal sebanyak 530 orang sedangkan Target Triwulan I Tahun 2024 indikator ini ditargetkan 500 orang dan telah terrealisasi outputnya sebanyak 668 orang atau sebesar 120 (133,60)% dengan bidang kompetensi penangkapan ikan sebanyak 668 orang, Output Capaian indikator ini diperoleh dari peserta ujian ANKAPIN III/ATKAPIN III dan peserta uji keahlian profesi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi masing-masing bidang kompetensi. Peserta yang mengikuti ujian ini dan dinyatakan lulus dibuktikan sertifikat. Untuk sertifikat yang belum terbit dikeluarkan surat keterangan lulus oleh Kepala Balai dilampirkan Berita Acara pelaksanaan ujian. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator ini mengalami peningkatan realisasi sebesar 106,17%, perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9 Perbandingan Capaian SDM KP yang bersertifikasi kompetensi

Dari data di atas dapat dilihat peningkatan target dan capaian indikator ini yang disebabkan oleh peningkatan layanan yang mendukung BPPP Tegal sebagai satker badan layanan umum. Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis BPPP Tegal 2025-2029 indikator ini telah tercapai sebanyak 668 Orang atau telah tercapai 126,04% dari target renstra sebanyak 530 orang. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 7 SDM KP yang bersertifikat kompetensi dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	500	668	120 (133,60)
2	BPPP Medan	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	-	-	-
4	BPPP Bitung	-	-	-
5	BPPP Ambon	-	-	-

Faktor keberhasilan untuk indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pelatihan, asessor yang tersertifikasi dan berkompeten serta status BPPP Tegal sebagai lembaga pelatihan yang tersertifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti uji kompetensi di BPPP Tegal. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh widyaiswara dan instruktur BPPP Tegal sebagai pelatih/asesor.

Adapun kegiatan penunjang untuk indikator ini adalah peningkatan sarana prasarana pelatihan dengan melakukan re-akreditasi lembaga, mengupgrade kemampuan assesor dan pelatih, sosialisasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM KP diperlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar yang ada. Sasaran Strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 5

Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)

IKU 5 Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal didefinisikan sebagai Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. IKU 5 diukur dengan menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Pada triwulan I dilakukan persiapan untuk pengadaan yang akan dilaksanakan di triwulan II. Tahun 2025 target indikator ini adalah 1 Unit dengan pengukuran capaian tahunan, sehingga sampai dengan triwulan ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama 6

Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)

IKU 6 Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal merupakan Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. IKU 6 diukur dengan menghitung Jumlah Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Tahun 2025 target

indikator ini adalah 1 Unit pengukuran capaian dilakukan secara tahunan. Hingga triwulan I sudah ada pengadaan konstruksi yang terumumkan namun kontrak baru akan dilaksanakan di triwulan II.

SASARAN KEGIATAN 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, BPPP Tegal mendukung tatakelola pemerintah yang baik, dengan melakukan pendokumentasian sebagai bukti pelaksanaan dan pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan. Untuk mewujudkan hal tersebut didukung dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 7

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Merupakan Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

IKU 7 diukur dengan formulasi sebagai berikut:

- A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan
- C. Persentase layanan dukungan manajemen internal

Dokumen dukung layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Perjanjian Kinerja	1
2	Manual IKU	1
3	Laporan Kinerja	
	a. Triwulan 1	
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	1
4	Dokumen Perencanaan Anggaran	
	a. DIPA	1
	b. RKAKL	1
5	Rencana Kerja Tahunan	1
6	Laporan Survey Kepuasan Pelanggan	
	a. Triwulan 1	
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	1
7	Laporan Keuangan	
	a. Semester I	
	b. Semester II (Tahunan)	1
8	Matrik Laporan SPIP	
	a. Triwulan 1	
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	1
9	Matrik Laporan Manajemen Risiko (MR)	
	a. Triwulan 1	
	b. Triwulan 2	
	c. Triwulan 3	
	d. Tahunan	1
10	Laporan Tahunan (Program dan Kegiatan)	
11	Prinscreen Aplikasi (Triwulan)	
	a. Kinerjaku	1
	b. Monev Kemenkeu	1

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen
	c. Bappenas E-Monev	1
	d. OMSPAN	1
Jumlah Dokumen		14

Adapun capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

SK. 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IKU 7. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)										
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
43,75	25	30,77	33,33	100	25	35	120 (140)	5,01	100	35

A. Capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal pada Triwulan I Tahun 2025 ditargetkan 25% dan terealisasi 35%. Adapun daftar capaian dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 14 Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen	Link Dokumen
1	Perjanjian Kinerja	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1w5yQ4VRgtsp8LOxPZdhyM9jdGeSUKcpt?usp=drive_link
2	Manual IKU	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1KweH_VrXSqqi74Mjf3DxzzaA-NkKLsVxx?usp=drive_link

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen	Link Dokumen
3	Laporan Kinerja			
	a. Triwulan 1	1		
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		
	d. Tahunan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1aKP1QTod6qYZ8J6kKPx7WkKaRa0lBn2b?usp=drive_link
4	Dokumen Perencanaan Anggaran			
	a. DIPA	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1ctqdBcOVE7chzDzahTILCRdAf1LFdf3R?usp=sharing
	b. RKAKL	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1D8h-n2WYx2dqwOK1D8Wgpl1YA_OMSdEu?usp=drive_link
5	Rencana Kerja Tahunan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/12cb13Cjm3lmDR5KsNrONx4L6lW3sfg3?usp=drive_link
6	Laporan Survey Kepuasan Pelanggan			
	a. Triwulan 1	1		
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		
	d. Tahunan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1FIJuH-u2k05AUwHU49yfn62Y7wpmObHy?usp=drive_link
7	Laporan Keuangan			
	a. Semester I	1		
	b. Semester II (Tahunan)	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1p4ZuMYfQlqDoiDe-I56laNz3J00DrYoM?usp=drive_link
8	Matrik Laporan SPIP			
	a. Triwulan 1	1		
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen	Link Dokumen
	d. Tahunan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1Wo2Juh0L2MTugDEzFJ2mc4A0_CBDIGjg?usp=drive_link
9	Matrik Laporan Manajemen Risiko (MR)			
	a. Triwulan 1	1		
	b. Triwulan 2	1		
	c. Triwulan 3	1		
	d. Tahunan	1	1	https://drive.google.com/drive/folders/1zx9U0o90IG9bw0pigilxEhEgcar5qmwe?usp=drive_link
10	Laporan Tahunan (Program dan Kegiatan)	1		
11	Prinscreen Aplikasi (Triwulan)			
	a. Kinerja	4	1	https://drive.google.com/file/d/16UkYDX-eo4ET7VXa86sy2tQaxcQTG1w/view?usp=sharing
	b. Monev Kemenkeu	4	1	https://drive.google.com/file/d/1-y-0Un2tu08O6vzZ4D_Chkj46wMvX4Wl/view?usp=sharing
	c. Bappenas E-Monev	4	1	https://drive.google.com/file/d/1iwgENT-q2NsEL5IMeW7UZnlAKRwNXoYJ/view?usp=sharing
	d. OMSPAN	4	1	https://drive.google.com/file/d/1cqPYTlarPvdUaskYjHQiXxe4NZ4SPtLR/view?usp=sharing
Jumlah Dokumen		40	14	
%			35,00	

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan tahun sebelumnya indikator ini memiliki data capaian lebih banyak, yaitu tercapai 35 % dari target tahunan, sedangkan tahun sebelumnya dengan capaian 33,33 % dari target tahunan sehingga ada kenaikan atau penurunan persentase capaian pada indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Reviu Target Renstra BPPP Tegal

Jika dibandingkan dengan reviu target renstra BPPP Tegal 2025-2029 indikator ini telah tercapai sebesar 35% dari target renstra tahun 2025.

D. Faktor penyebab Keberhasilan

Adanya SOP dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan yang merupakan dokumen yang harus ada dimiliki dalam dukungan manajemen internal.

E. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumberdaya bahwa dalam pencapaian kegiatan ini didukung oleh SDM BPPP Tegal yang telah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan sesuai bidang dan didukung dengan sistem pelaporan melalui aplikasi.

F. Kegiatan Penunjang

Melakukan rapat monitoring dan evaluasi dalam rangka pemenuhan data dukung dan penyusunan laporan/ dokumen dukungan internal.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 15 Perbandingan (*benchmarking*) Capaian Triwulan I Tahun 2025 IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	25	35	120 (140)
2	BPPP Medan	25	25,45	101,8
3	BPPP Banyuwangi	25	30,91	120 (123,64)
4	BPPP Bitung	25	28,33	113,32
5	BPPP Ambon	25	33,33	120 (133,32)

Indikator Kinerja Utama 8

Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)

IKU 8 Indeks Profesionalitas ASN merupakan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a). Kualifikasi; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.

Pengukuran IP ASN telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sedangkan untuk Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP dilakukan dengan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Pengukuran komponen kualifikasi diukur dari dengan formula :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$\begin{aligned} IP_1 &= W_{1j} * R_{1j} \\ IP_1 &= W_{2k} * R_{2k} \\ IP_1 &= W_{3l} * R_{3l} \\ IP_1 &= W_{4m} * R_{4m} \end{aligned}$$

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

a. Kualifikasi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

b. Kompetensi

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP tetap dinilai secara proporsional

c. Kinerja

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d. Disiplin

No	Nama Hukuman Disiplin *****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

Pengolahan atas hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur yang dapat dilihat melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn>. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesional ASN dengan nilai antara sebagai berikut:

Tabel 16 Kategori Nilai Indeks Profesionalitas ASN

No	Nilai	Kategori	
1	91 – 100	Sangat Tinggi	sangat profesional
2	81 – 90	Tinggi	cenderung profesional
3	71 – 80	Sedang	rentan tidak profesional
4	61 – 70	Rendah	cenderung tidak profesional
5	0 – 60	Sangat Rendah	sangat tidak profesional

IKU indeks profesionalitas ASN BPPP Tegal akan dilakukan penilaian pada semester I (triwulan II) dan semester II (triwulan IV). Dalam rangka persiapan memenuhi target IKU ini para pegawai mengikuti berbagai uji kompetensi, pelatihan maupun seminar/workshop.

Indikator Kinerja Utama 9

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti

secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP. Reviu dan Evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran) ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Tabel 17 Capaian IKU 9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)

SK. 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IKU 9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)										
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	100	75	80	85	85	100	117,65	25	89	112,36

Berdasarkan tabel diatas hasil capaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal telah tercapai 100% dari target triwulan sebesar 85. Indikator ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode Tahun 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker BPPSDMKP. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator ini tidak mengalami kenaikan sebesar 25%.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 18 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I IKU 9 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	85	100	117.65
2	BPPP Medan	85	85	100
3	BPPP Banyuwangi	85	85	100
4	BPPP Bitung	85	85	100
5	BPPP Ambon	85	85	100

Analisis dan Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah pengukuran dilakukan oleh tim inspektorat jenderal KKP yang telah bersertifikat dan berpengalaman dibidang pengawasan. Faktor penyebab keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen pimpinan dan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen. Adapun kegiatan penunjang kegiatan ini adalah melakukan kompilasi berkas/dokumen tindaklanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal, melakukan penginputan/mengupload dokumen tindaklanjut ke dalam aplikasi SIDAK, dan melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen Tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK kepada Tim Auditor Inspektorat Jenderal KP, kemudian melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu.

Indikator Kinerja Utama 10

Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)

Indikator Kinerja Utama Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian indikator ini belum dapat dilakukan pengukurannya di Triwulan I, karena pengukuran akan dinilai secara tahunan. Indikator ini memiliki target tahunan sebesar 80. Dalam rangka memenuhi target IKU ini BPPP Tegal menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan selama 5 tahun sesuai dengan kriteria untuk pengukuran.

Indikator Kinerja Utama 11

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN satker Pusat Pelatihan Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Formula
- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:

- Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
- Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
- Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Ini merupakan IKU baru di Tahun 2025. Capaian indikator ini belum dapat dilakukan pengukurannya di Triwulan I, karena pengukuran akan dinilai secara tahunan. Indikator ini memiliki target tahunan sebesar 80. Untuk pemenuhan target IKU ini dilakukan penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Indikator Kinerja Utama 12

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)

Indikator Kinerja Utama Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal merupakan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan

dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

Persentase RU PBJ yang diumumkan = (Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP)/(Pagu Pengadaan Barang/Jasa) x 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 19 Capaian IKU 12 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)

SK. 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IKU 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)										
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	80	80	100	120 (125)	100	84	0

Berdasarkan tabel diatas hasil capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal telah tercapai 100% dari target triwulan sebesar 80. Indikator ini diperoleh dari hasil Surat capaian indikator kinerja dari Biro Umum dan PBJ dan Setjen KKP berdasarkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Ini merupakan IKU baru di Tahun 2025.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 20 Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan I IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	80	100	120 (125)
2	BPPP Medan	80	100	120 (125)
3	BPPP Banyuwangi	80	100	120 (125)
4	BPPP Bitung	80	100	120 (125)
5	BPPP Ambon	80	100	120 (125)

Analisis dan Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah pengukuran dilakukan oleh tim Biro Umum dan PBJ yang telah bersertifikat dan berpengalaman dibidang pengadaan barang jasa. Faktor penyebab keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen pimpinan dan penanggung jawab kegiatan untuk mengupload pengumuman dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Adapun kegiatan penunjang kegiatan ini adalah melakukan penginputan/mengupload dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan tepat waktu.

Indikator Kinerja Utama 14

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK

Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025

Level 2 (Satker) 71,50

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian RO	75
Efisiensi (25)	Penggunaan SBK	10
	Efisiensi SBK	15

a. Efektivitas

1) Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVROi : Realisasi Volume RO i
TVROi : Target Volume RO i
n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja
 $Indeks_{SBK_i}$: Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
 $Indeks_{RA_{SBK_i}}$: Indeks Realisasi RO i SBK
 n : Jumlah RO SBK

Formula pengukuran :

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA_{\text{Satker}} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

$NKPA_{\text{Satker}}$: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
 CRO : Capaian RO
 $Penggunaan_{SBK}$: Penggunaan SBK
 $NE_{Alokasi}$: Nilai Efisiensi Alokasi
 W_{CRO} : Bobot Capaian RO
 $WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK
 $WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi

Capaian indikator ini belum dapat dilakukan pengukurannya di Triwulan I, karena pengukuran akan dinilai secara tahunan. Indikator ini memiliki target tahunan sebesar 71,5. Dalam rangka mencapai target, kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan anggaran yang sudah disusun.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Salah satu tujuan BPPSDMKP dalam mendukung visi Kementerian adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal.

BPPSDMP KP sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP. Untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 14

Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)

IKU 14 Kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh oleh Satker BPPP Tegal merupakan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat di wilayahnya.

Indikator kinerja kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh oleh Satker BPPP Tegal diukur dengan menghitung jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang telah disuluh yang disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Kepala Satminkal Penyuluhan. Target IKU 14 pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 50 kelompok yang disuluh di BPPP Tegal sebagaimana data ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 21 Capaian IKU 14 Kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)

SK. 4 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
IKU 14. Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)										
Realisasi TW I Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025					Rencana Kegiatan 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
1.470	1.247	1.351	155	50	50	50	100	-67,74	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh BPPP Tegal di targetkan pada Tahun 2025 sebanyak 50 kelompok sedangkan Target Triwulan I sebanyak 50 kelompok dan telah tercapai sebanyak 50 kelompok atau sebesar 100%. Dengan kriteria sebanyak 14 kelompok pemula, 11 kelompok lanjut dan 25 kelompok madya.

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja kelompok pelaku utama / pelaku usaha yang disuluh oleh Satker BPPP Tegal dengan tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan atau dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10 Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh dengan tahun sebelumnya

Dari gambar diatas dapat dilihat target dan realisasi kelompok disuluh di BPPP Tegal mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena adanya peralihan penyuluh PNS dan PPPK ke satminkal lain (BRBATPP Bogor dan BPPP Banyuwangi) sehingga tersisa capaian kelompok yang disuluh dari 5 (lima) penyuluh PPB (kab tegal dan kota tegal). Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai Tahun 2025-2029 telah tercapai sebesar 100% dari jumlah 50 kelompok pada tahun 2025. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 22 Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 10 Kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	50	50	100
2	BPPP Medan	500	600	120
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	10	11	110
5	BPPP Ambon	300	320	107

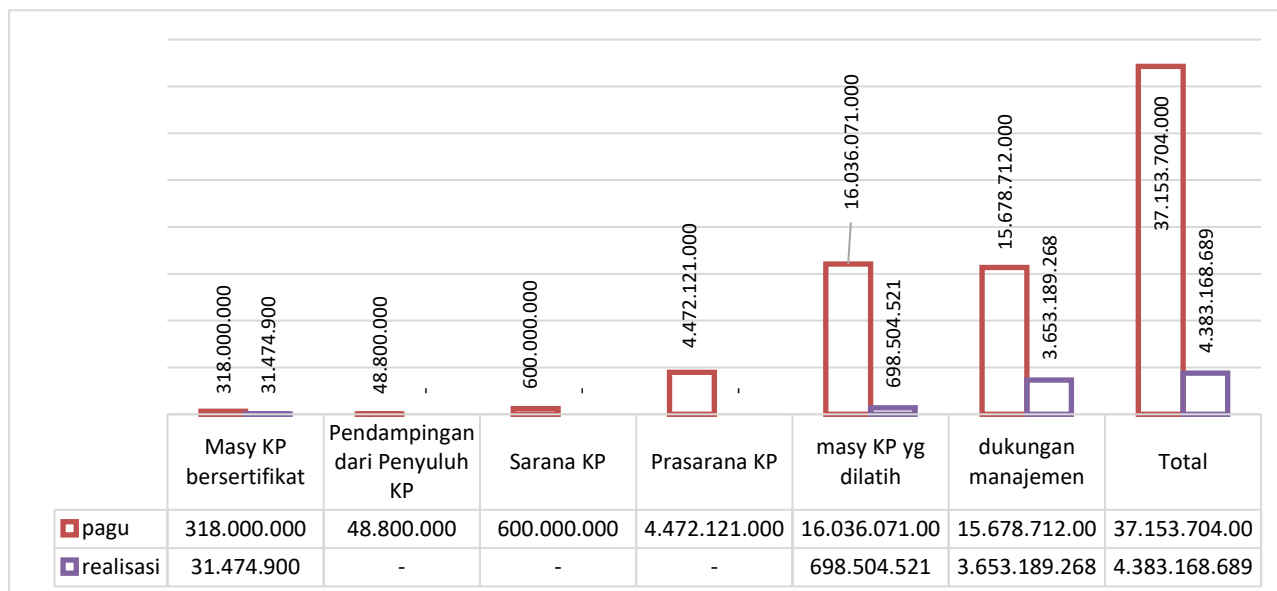
Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja sejenis. Adanya peralihan penyuluh PNS ke satminkal lain, menjadikan BPPP Tegal hanya memiliki penyuluh bantu atau pppk dengan jumlah yang lebih sedikit, sehingga memiliki target dan output lebih kecil dibandingkan balai lain.

Faktor Keberhasilan untuk indikator ini adalah adanya Peraturan Kepala BPPSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia dalam kegiatan ini yaitu penyuluhan dilakukan oleh penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan bantu yang ditempatkan pada lokasi masing-masing, sehingga kegiatan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini adalah melaksanakan koordinasi antara penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok binaan serta memfasilitasi kelompok dalam mendapatkan akses permodalan, akses pasar, akses iptek dan meningkatkan PKS kelompok melalui sosialisasi baik peraturan atau teknologi informasi terkini di bidang perikanan.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran yang dialokasikan kepada BPPP Tegal Tahun 2025 adalah sebesar Rp 37.153.704,000,- telah terrealisasi sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp. 4.383.168.689 atau 18,82 %. Adapun realisasi per output anggaran Triwulan I Tahun 2025 BPPP Tegal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11 Realisasi per output anggaran BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025

Secara umum kinerja BPPP Tegal pada Triwulan I Tahun 2025 telah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi anggaran yang mencapai 18,82%.

Adapun pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Tegal dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Belanja Pegawai	9,878,712,000	3,038,948,986	30.76
Belanja Barang	22,202,871,000	1,344,219,703	6.05
Belanja Modal	5,072,121,000	-	-
TOTAL	37,153,704,000	4,383,168,689	11.80

Tabel 24 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	-	-	-	-
	2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	120	16.036.071.000	698.504.521	4,36
	3	Nilai PNBSP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	120	-	-	-
	4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	120	318.000.000	31.474.900	9,90
Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	-	600.000.000	-	-
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	-	4.472.121.000	-	-
	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	120	15.678.712.000	3.653.189.268	23,30
	8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (Indeks)	-	-	-	-
	9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	117	-	-	-
	10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	-	-	-	-
	11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	-	-	-	-
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	120	-	-	-

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	-	-	-	-
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	100	48.800.000	-	-
		TOTAL		37.153.704.000	4.383.168.689	11,80

3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

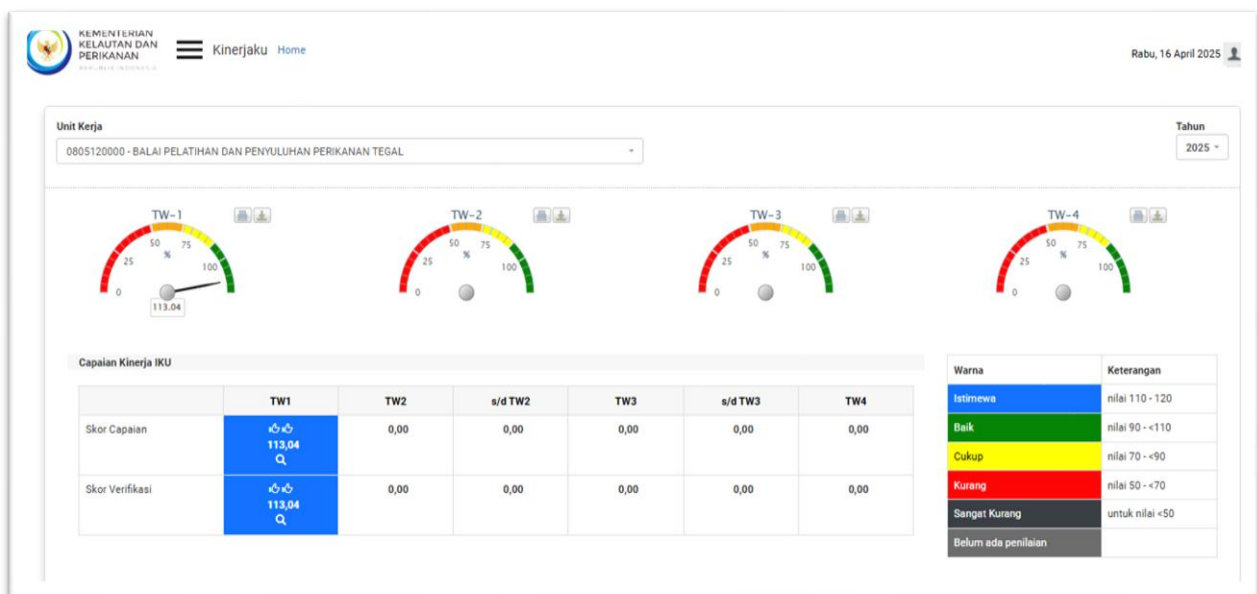
Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi smart DJA.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, besaran data capaian kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 sebesar 113,04%, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 12 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal yang terukur pada Triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 14 (empat belas) indikator yang telah tercapai yaitu sebagai berikut:

Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal yang terukur pada Triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 14 (empat belas) indikator yang semuanya menunjukkan ketercapaian terhadap target yang telah ditetapkan, dengan status indikator capaian hijau dan biru. Adapun capaian tersebut antara lain:

Tabel 25 Capaian Kinerja BPPP Tegal Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	
						Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	8.817	-	-	-
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	3.762	5.273	120 (140,16)
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81	4,06	6,770	120 (166,70)
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	530	500	668	120 (133,51)
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	-	-	-
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	-	-	-
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	25,00	35,00	120 (140)
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	
						Capaian	%
	Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	85	100	117,65%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80	-	-	-
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	-	-	-
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	80	100	120 (125)
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,5	-	-	-
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	50	50	50	100%

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut atas rekomendasi pada laporan kinerja tahun sebelumnya Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 26 Tindak lanjut rekomendasi pada laporan kinerja tahun 2024

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak lanjut	Link Bukti
1	Terdapat addendum kontrak Prasarana Pembangunan Asrama Bahari Residence III dengan perpanjangan 50 hr kerja sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 dikarenakan	Memonitoring penyelesaian pekerjaan sesuai dengan perpanjangan waktu yang diberikan	memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kontrak selama 40 hari kalender s.d 24 Maret 2025 dan pengenaan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) nilai kontrak yang	https://drive.google.com/file/d/1HM9RY80nuUOg0-NQCUBiGnXSfectNawQ/view?usp=sharing

	sampai dengan akhir kontrak progres fisik baru mencapai 75 %. Dari nilai pagu Rp 3.341.828.000,- sudah masuk ke realisasi/pengeshan BLU Tahun 2024 sejumlah 3.191.594.743 namun dari realisasi tersebut, sejumlah Rp 983.543.011,- masuk ke rekening dana penampungan/RP ATA BLU yang merupakan dana yang masih ditahan penggunaannya/ belum bisa dicairkan ke pihak ketiga sampai pekerjaan selesai maksimal batas waktu 13 Februari 2025.		belum dikerjakan setiap hari kalender keterlambatan (setelah tanggal kontrak berakhir yaitu 25 Desember 2024)	
--	---	--	---	--

4.3. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPP Tegal di Triwulan I Tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Rencana Aksi
1	Adanya pemblokiran anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Melakukan penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan secara maksimal

Kemudian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

IKU dengan Periode Pengukuran Tahunan

Terdapat capaian indikator lebih dari 120 % agar dilakukan penyesuaian target pada perencanaan tahun berikutnya.

Verifikasi dan Validasi Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat menyajikan data yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* BPPP Tegal. Data dukung laporan kinerja dapat diakses melalui link <https://bit.ly/KinerjaPuslatluh>. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Tegal. Akhirnya, BPPP Tegal berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan
BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal
Achmad Subijakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang)	8.817
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (orang)	12.540
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (orang)	530
4	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	1
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)	80
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	21.426.192.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.678.712.000
Total Anggaran BPPP TEGAL		37.104.904.000

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilia Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Achmad Subijakto

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Penyuluhan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id SUREL pusluhkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal


Achmad Subijakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	50

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	48,800,000
Total Anggaran BPPP TEGAL		48,800,000

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal


Achmad Subijakto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

JALAN MARTOLOYO.PO.BOX 22 TEGAL,KODE POS 52122
TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064
LAMAM <https://kkp.go.id/brsdrm/bp3tegal> SUREL bp3tegal@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
NOMOR : B.8/SK/BBPPP.TGL/KP.110/I/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, dipandang perlu menetapkan petugas pengelola kinerja yang meliputi pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan pengelolaan capaian kinerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal;
- c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
13. Surat Pengesahan DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.2.239188/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini. |
| KEDUA | : | Pengelolaan Kinerja terdiri dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, pengisian aplikasi dan pelaporan kinerja sebagaimana Diktum KESATU. |
| KETIGA | : | Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja dengan tugas: <div style="margin-left: 20px;"> A. Pengarah:
 emberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja BPPP Tegal. </div> |

- B. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola kinerja BPPP Tegal.
- C. Pelaksana:
1. Ketua:
mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;
 2. Sekretaris;
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan BPPP Tegal dan;
 - b. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pengelola Kinerja BPPP Tegal;
 3. Sub Tim Perencanaan Kinerja
 - a. memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan, dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. memastikan bahwa Indikator Kinerja:
 - 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indikator kinerja level I maupun level II;
 - 2) Indikator Kinerja eselon I telah selaras dengan IKU;
 - 3) Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C, dan
 - 4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi.
 - c. memastikan bahwa dokumen kontrak kinerja memuat:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK)
 - a) tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) rincian target IKU secara bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing masing IKU;
 - 3) matriks cascading kinerja kepada penanggungjawab IKU;
 - 4) rencana aksi atas PK dan evaluasinya.

- d. memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- e. memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

4. Sub Tim Pengukuran Kinerja

- a. menyusun mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
- b. melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan);
- c. memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- d. mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

5. Sub Tim Pelaporan Kinerja

- a. mengoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan);
- b. memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
- d. memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam laman resmi; dan
- e. mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

6. Sub Tim Evaluasi Kinerja

- a. melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
- b. menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya;
- c. melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan;
- d. menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan

- e. mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

7. Sub Tim Verifikasi Kinerja

- a. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
- b. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
- c. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
- d. memastikan seluruh *softcopy* data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi daring; dan
- e. mengoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelolaan Kinerja menyusun dan melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal per triwulan (Interim) dan Tahunan (Laporan Kinerja/LKj).
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan dalam penetapan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Achmad Subijakto

Tembusan:
Yang bersangkutan;

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala BPPP Tegal
tentang Tim Pengelolaan Kinerja Tahun 2025 Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal .
Nomor : B.8/SK/BPPP.TGL/KP.110/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

A. Pengarah

Kepala Pusat Pelatihan KP

B. Penanggung Jawab

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

C. Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Yuda Adyatama Firmansyah, S. E	Kepala Subbagian Umum	Ketua
2	Qonita Hidayana, A. Md	Pengelola Program dan Laporan	Sekretaris
Sub Tim Perencanaan Kinerja			
1	Seto Satrio Ginasib, S.Pi	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Koordinator
2	Ade Yunaifah Afriyani, S.E, M.Pi	Widyaiswara Ahli Muda	Anggota
3	Ratih Mahargiani, S.Pi, M.Si	Penyusun Program Penyelenggara Diklat	Anggota
Sub Tim Pengukuran Kinerja			
1	Rika Putri, S. St. Pi, M.P	Widyaiswara Ahli Madya	Koordinator
2	Nur Hidayah, S.Pi	Pengelola Program dan Laporan	Anggota
3	Trias Wahyuning Putri, S.Pi, M.Pi	Widyaiswara Ahli Madya	Anggota
Sub Tim Pelaporan Kinerja			
1	Lutfi Jauhari, S.St.Pi., M.Si	Widyaiswara Ahli Madya	Koordinator
2	Agus Widiyanto, S.St.Pi, M.Pi	Widyaiswara Ahli Muda	Anggota
3	Miftah Farid, A.Md., S.ST.Pi	Instruktur Penyelia	Anggota
Sub Tim Evaluasi Kinerja			
1	Eko Widayanto Nugroho, S.Pi	Analisis Materi Penyuluhan	Koordinator
2	Uli Safriani, S. Kel., M.I.L	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
3	Nur Azizah, S. AP	Analisis SDM Aparatur	Anggota

Sub Tim Verifikasi Kinerja			
1	Dedi Hertono, S.St.Pi, M.Pi,	Perencana Muda	Koordinator
2	Septa Hadi Nugroho, S. E	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
3	Ahmad Harianto, S.Pi	Instruktur Muda	Anggota

Mengetahui
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Achmad Subijakto